

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

e-mail : info@pn-makassar.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jln. R.A. Kartini No. 18/23

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667

MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

e-mail : info@pn-makassar.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Makassar adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

MAKASSAR, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,
Plt. Sekretaris,

ERWIN SYAM, ST
NIP. 19810124 200604 1 004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional.....	17
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	21
A. Penjelasan Umum.....	21
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	55
Daftar dan Lampiran.....	58
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap.....	59
Daftar Hibah Langsung.....	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Makassar

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 MAKASSAR - Sulawesi Selatan 90111

Telp. 04113624058 Fax. 04113634667 e-mail : info@pn-makassar.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

MAKASSAR, 31 Desember 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,

Plt. Sekretaris,

ERWIN SYAM, ST

NIP. 19810124 200604 1 004

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.224.975 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp22.714.866.072 atau mencapai 98,57 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp23.044.633.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp302.393.915.036, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp45.272.056; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp302.347.392.980; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1.250.000.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp53.778.396 dan Rp302.340.136.640.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.224.975, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp25.457.783.130 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan

Operasional senilai Rp(25.441.558.155) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp70.404.759 dan surplus(defisit) sebesar Rp(25.371.153.396) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(25.371.153.396).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp299.116.023.303 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp(25.371.153.396) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(5.706.443.841) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp34.301.710.574 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp302.340.136.640.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	16.224.975	0	29.730.733
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	16.224.975	0	29.730.733
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	20.061.943.000	19.954.353.976	99,46	20.241.154.654
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.793.690.000	2.573.860.696	92,13	2.340.900.709
3.	Belanja Modal	B.2.3.	189.000.000	186.651.400	98,76	253.352.400
	Jumlah Belanja Negara		23.044.633.000	22.714.866.072	98,57	22.835.407.763

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 3.	0	0
Persediaan	C. 4.	45.272.056	52.109.945
Jumlah Aset Lancar		45.272.056	52.109.945
Aset Tetap			
Tanah	C. 5.	248.374.899.000	239.617.817.000
Peralatan dan Mesin	C. 6.	8.803.475.895	8.065.248.617
Gedung dan Bangunan	C. 7.	58.404.578.800	61.576.269.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 8.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 9.	162.196.469	162.196.469
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 10.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 11.	(13.397.757.184)	(10.318.625.859)
Jumlah Aset Tetap		302.347.392.980	299.102.905.227
Aset tak Berwujud	C. 12.	5.000.000	5.000.000
Aset Lain-Lain	C. 13.	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 14.	(3.750.000)	(2.500.000)
Jumlah Aset		302.393.915.036	299.157.515.172
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 15.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		53.778.396	41.491.869
Jumlah Kewajiban		53.778.396	41.491.869
EKUITAS			
Ekuitas	C. 16.		
Jumlah Ekuitas Dana		302.340.136.640	299.116.023.303
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		302.393.915.036	299.157.515.172

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	16.224.975	29.728.900
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	19.956.342.240	20.102.145.452
Beban Persediaan	D. 3	156.023.868	90.374.368
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.775.652.297	1.572.523.364
Beban Pemeliharaan	D. 5	511.690.042	562.604.503
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	126.889.400	121.000.531
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	2.931.185.283	2.865.499.521
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		25.457.783.130	25.314.147.739
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(25.441.558.155)	(25.284.418.839)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		70.404.759	928.963
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		2.278.403	2.282.433
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		70.404.759	928.963
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(25.371.153.396)	(25.283.489.876)
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(25.441.558.155)	(25.283.489.876)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	301.593.836.149	301.593.836.149
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(25.283.489.876)	(25.283.489.876)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	(5.706.443.841)	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	(5.913.624.000)	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	207.180.159	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	34.301.710.574	22.805.677.030
Ekuitas Akhir		302.340.136.640	299.116.023.303

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Makassar

Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah Visi Pengadilan Negeri Makassar adalah "Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar yang Agung", yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai salah satu Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah Misi Pengadilan Negeri Makassar adalah

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat,
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain,

3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
4. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat,
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati,
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Makassar melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penerimaan/pendaftaran dan pemeriksaan perkara,
2. Meningkatkan penyelesaian permohonan,
3. Meningkatkan penyelesaian perkara,
4. Meningkatkan akseptabilitas pengelolaan penyelesaian perkara,
5. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara,
6. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap teradilan (access to justice),
7. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Makassar adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	0
2.	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0
Total Pendapatan		0	0

Realisasi pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.224.975 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. (13.505.758) atau (83,24) persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena :

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Makassar;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.224.975	20.333.300	(4.108.325)	(25,32)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	9.395.600	(9.395.600)	(79,23)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.833	(1.833)	(99,99)
Total Pendapatan		16.224.975	29.730.733	(13.505.758)	(83,24)

B.1. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
22.714.866.072*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Makassar per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp.22.714.866.072 setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.466.298, atau sebesar 98,58% dari anggaran senilai Rp23.044.633.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	20.061.943.000	19.954.360.274	99,46
Belanja Barang	2.778.180.000	2.562.790.696	92,25
Belanja Modal	189.000.000	186.651.400	98,76
Total Belanja Bruto	23.044.633.000	22.717.332.370	98,58
Pengembalian Belanja		(2.466.298)	0
Total Belanja Netto	23.044.633.000	22.714.866.072	98,58

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (120.541.691) atau sebesar (0,53) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan ini disebabkan adanya berkurangnya beban belanja fungsional hakim dan ASN, pagu belanja modal tahun 2018 lebih besar dari pagu belanja modal tahun 2019.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	19.954.353.976	20.241.154.654	(286.800.678)	(1,43)
Belanja Barang	2.573.860.696	2.340.900.709	232.959.987	9,05
Belanja Modal	186.651.400	253.352.400	(66.701.000)	(35,73)
Total Belanja	22.835.407.763	22.835.407.763	(120.541.691)	(0,53)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai :*
**Rp19.954.353.
976**

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Makassar per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp19.954.353.976 dan Rp20.241.154.654.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami penurunan sebesar 1,43 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain berkurangnya belanja fungsional hakim.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	6.010.595.120	5.763.977.500	246.617.620	4,10
Beban Pembulatan Gaji PNS	82.802	64.982	17.820	21,52
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	390.572.950	388.493.600	2.079.350	0,53
Beban Tunj. Anak PNS	135.232.904	130.020.538	5.212.366	3,65
Beban Tunj. Struktural PNS	60.260.000	51.030.000	9.230.000	15,31
Beban Tunj. Fungsional PNS	7.396.850.000	8.198.475.000	(801.625.000)	(10,83)
Beban Tunj. PPh PNS	1.170.452.738	1.287.161.848	(116.709.110)	(9,97)
Beban Tunj. Beras PNS	260.567.160	264.477.840	(3.910.680)	(1,5)
Beban Uang Makan PNS	926.402.000	1.040.355.000	(113.953.000)	(12,30)
Beban Tunjangan Umum PNS	34.325.000	33.180.000	1.145.000	3,33
Beban Tunjangan Kemahalan	386.100.000	426.600.000	(39.500.000)	(10,23)
Hakim				
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	3.182.919.600	2.658.615.600	524.304.000	16,47
Total Belanja Brutto	19.954.360.274	20.242.451.908	(288.091.634)	(1,44)
Pengembalian Belanja	(6.298)	(1.297.254)	1.290.956	20,477
Total Belanja Netto	19.954.353.976	20.241.154.654	(286.800.678)	(1,43)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang*
:

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Makassar per 31 Desember TA 2019 dan

Rp2.573.860.6
96

TA 2018 adalah sebesar Rp2.573.860.696 dan Rp2.340.900.709.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,95 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain : adanya penambahan sewa rumah hakim.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	1.150.474.516	843.816.875	306.657.641	26,65
Belanja Barang Non Operasional	13.530.000	73.840.525	(60.310.525)	(445,75)
Belanja Jasa	779.429.988	622.512.300	156.917.688	20,13
Belanja Pemeliharaan	517.066.792	548.198.693	(31.131.901)	(6,02)
Belanja Perjalanan Dinas	115.819.400	121.000.531	(5.181.131)	(4,47)
Total Belanja Brutto	2.573.860.696	2.340.900.709	232.959.987	9,95
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	2.573.860.696	2.340.900.709	232.959.987	9,95

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja Modal
:
Rp186.651.400

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Makassar per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp186.651.400 dan Rp253.352.400.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami penurunan sebesar (35,73) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain : Anggaran belanja modal di TA 2019 lebih kecil dibanding anggaran belanja modal TA 2018

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	114.745.500	253.352.400	(138.606.900)	(120,79)
Belanja Modal Lainnya	71.905.900	0	71.905.900	0
Total Belanja Brutto	186.651.400	253.352.400	(66.701.000)	(35,73)
Pengembalian Belanja	0	0	0	
Total Belanja Netto	186.651.400	253.352.400	(66.701.000)	(35,73)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
45.272.056

Aset Lancar

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1	Kas Bendahara Pengeluaran	0	0
	Jumlah	0	0

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut telah disetor ke rekening Kas Negara pada tanggal 27 Desember 2019 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 19B0D61QTM1MB262 dan tanggal 30 Desember 2019 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) C47A148VU0T0HF7S

C.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
1	Belanja Dibayar di Muka	0	0
Jumlah		0	0

C.3.Persediaan

Persediaan:
Rp45.272.056

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp45.272.056 dan Rp52.109.945. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	40.831.906	52.109.945
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	4.440.150	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		45.272.056	52.109.945

C.14. Tanah

Tanah: Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp248.374.899.000 dan Rp239.617.817.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	239.617.817.000
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	4.686.512.000
Revaluasi Aset	4.136.279.000
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	65.709.000
Saldo per 31 Desember 2019	248.374.899.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2018	248.374.899.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	1	600	SHP No. 78/1977	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	8.021.155.000
2.	2	397	SHP No. 41/1992	Dep. Kehakiman RI berkedudukan di Jakarta	Rumah Dinas	1.109.642.000
3.	3	900	SHM No. 544/1980	H. Kalamang	Rumah Dinas	13.718.058.000
4.	4	200	SHM No. 674/1982	Hamzy	Rumah Dinas	329.361.000
5.	5	200	SHM No. 675/1982	Hamzy	Rumah Dinas	329.361.000
6.	6	1.440	SHP No. 60/1992	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	2.582.331.000
7.	7	560	SHP. No. 160	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	1.892.338.000
8.	8	1.050	SHP No. 20002/1999	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	3.618.709.000
9.	9	306	SHP No. 387/1994	Pemerintah RI Cq. MARI	Rumah Dinas	3.981.641.000
10.	10	7.187	SHP No. 59/1992	Dep. Kehakiman RI	Kantor	208.105.791.000
11.	11	1.661	SHP No. 20007/2012	Pemerintah RI Cq. MARI	Kantor	4.686.512.000
Jumlah						248.374.899.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 Rp248.374.899.000, nilai mutasi tambah sebesar Rp8.757.082.000 diperoleh dari transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Makassar berupa tanah untuk gedung kantor yang terletak di Jl. Telkom Mas Raya G/16 dengan BAST Nomor W22.U/1404/KU/4/2019 tanggal 12 April 2019 sebesar Rp4.686.512.000 dan hasil revaluasi aset No. LHIP-484/REV/WKN.15/KNL.02/2019 sebesar Rp4.070.570.000.

C.15. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
8.803.475.895*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp8.803.475.895 dan Rp8.065.248.617.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	8.065.248.617
Mutasi Tambah	
Pencatan Saldo Awal	190.275.800
Transfer masuk	332.126.978
Perolehan Lainnya	68.805.000
Belanja Modal	114.745.500
Belanja Barang	32.274.000
Mutasi Kurang	
...	..
Saldo per 31 Desember 2019	8.867.025.371
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	7.534.481.909
Nilai Buku 31 Desember 2019	1.332.543.400

Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester II Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp114.745.500, sedangkan dari pembelian adalah sebesar Rp32.274.000, selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin, penambahan sebesar Rp32.274.000 merupakan pembelian dengan menggunakan akun pembelian barang dan pemeliharaan berupa pembelian mic buah, dan speaker 19 unit, amplifier

1 unit dan kabel 3 buah, perolehan lainnya berupa PPO dari bank BTN sebesar Rp68.805.000 dan transfer masuk berupa Server, PC, UPS dan komputer jaringan lainnya sebesar Rp332.126.978.-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
58.404.578.800*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp58.404.578.800 dan Rp61.576.269.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	61.576.269.000
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	6.740.597.900
Pengembangan Nilai Aset	71.905.900
Mutasi Kurang	
Revaluasi Aset	9.984.194.000
Saldo per 31 Desember 2018	58.404.578.800
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	5.903.941.051
Nilai Buku 31 Desember 2018	52.500.637.749

Nilai penambahan aset diperoleh dari belanja modal penambahan daya listrik sebesar Rp. 71.905.900 dan transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Makassar berupa bangunan gedung kantor yang terletak di Jl. Telkom Mas Raya G/16 Makassar dengan BAST Nomor. W22.U/1404/KU/4/2019 tanggal 12 April 2019.

Pada simak BMN jumlah nilai aset untuk Rumah Negara Gologan II Tipe C Permanen bertambah 4 unit disebabkan karena update aplikasi simak yang sebenarnya jumlah tersebut hanya 19 unit.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019

dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	0
Mutasi Tambah	
...	...
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 162.196.469

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp162.196.469 dan Rp162.196.469.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	162.196.469
Mutasi Tambah	
...	...
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 31 Desember 2019	162.196.469
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2018	1.500.000
Nilai Buku 31 Desember 2018	160.696.469

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.19. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (13.397.757.184) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(13.397.757.184) dan Rp(10.318.625.859).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.803.475.895	7.492.316.133	1.311.159.762
2	Gedung dan Bangunan	58.404.578.800	5.903.941.051	52.500.637.749
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	162.196.469	1.500.000	160.696.469
	Jumlah	67.370.251.164	13.397.757.184	53.972.493.980

C.21. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp5.000.000 Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.000.000 dan Rp. 5.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset

yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutase transaksi ATB per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	5.000.000
Mutasi Tambah	
	0
Mutasi Kurang	
	0
Saldo per 31 Desember 2019	5.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	3.750.000
Nilai Buku 31 Desember 2019	1.250.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Makassar berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2019.

C.22. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain : Rp 0 Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Makassar serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	0

C.23. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (3.750.000) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp(3.750.000) dan Rp(2.500.000). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset tak Berwujud	5.000.000	5.000.000
2	Aset Lain-lain	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	3.750.000	2.500.000
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	3.750.000	2.500.000
	Nilai buku Aset Lainnya	1.250.000	2.500.000

C.24. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.25. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp302.340.136.
640*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp302.340.136.640 dan Rp299.116.023.303. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. (12.286.527) (29,61%) dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp53.778.396, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp41.491.869.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBp : Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp16.224.975 dan Rp29.728.900. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.224.975	20.333.300	(4.108.325)	(20,20)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	9.395.600	(9.395.600)	(100,00)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.833	(1.833)	(100,00)
Total Pendapatan		16.224.975	29.730.733	(13.505.758)	(45,42)

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp19.956.342.240 dan Rp20.102.145.452. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji	19.956.342.240	20.102.145.452	(145.803.212)
2.	Beban Tunjangan-tunjangan
3.	Beban Honorarium dan Vakansi
4.	Beban Lembur
	Total	19.956.342.240	20.102.145.452	(145.803.212)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :*
Rp156.023.868

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp156.023.868 dan Rp90.374.368. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	156.023.868	90.374.368	65.649.500
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga
3.	Beban Persediaan Lainnya
	Total	156.023.868	90.374.368	65.649.500

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :*
Rp1.775.652.297

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.775.652.297 dan Rp1.572.523.364. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian

Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Barang dan Jasa	1.775.652.297	1.572.523.364	203.128.933
Total Beban Jasa	1.775.652.297	1.572.523.364	203.128.933

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:
Rp511.690.042*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp511.690.042 dan Rp562.604.503. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan	511.690.042	562.604.503	50.914.461
Total Beban Pemeliharaan	511.690.042	562.604.503	50.914.461

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas :
Rp126.889.400*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp126.889.400 dan Rp121.000.531. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Dinas	126.889.400	121.000.531	58.826.810
Total Beban Perjalanan Dinas	126.889.400	121.000.531	58.826.810

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir

*Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp2.931.185.283*
3

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.931.185.283 dan Rp2.865.499.521. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.931.185.283	2.865.499.521	65.685.762
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.931.185.283	2.865.499.521	65.685.762

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Kantor			
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan PNB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp299.116.023.303 dan Rp301.593.836.149.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp(25.371.153.396) dan Rp(25.283.489.876) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan

karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 Dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(5.913.624.000) dan Rp0 Revaluasi Aset tersebut berasal hasil penilaian KPKNL.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp207.180.159 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp34.301.710.574 dan Rp22.805.677.030.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(16.224.975)
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.714.866.072
Transfer Masuk	11.603.069.477
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	34.301.710.574

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp(16.224.975) sedangkan DKEL sebesar Rp22.714.866.072.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

Transfer masuk yang diterima Pengadilan Negeri Makassar sebesar Rp. 11.603.069.477 yang berasal dari Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Urusan Mahkamah Agung RI.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp302.340.136.640 dan Rp299.116.023.303.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap laporan keuangan semester lalu maupun pada laporan keuangan tahun lalu

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja pegawai berupa tunjangan fungsional hakim yang seharusnya dibayar di bulan Nopember 2019 sebesar Rp1.610.004 namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2020
2. Terdapat belanja pegawai berupa kekurangan gaji kenaikan pangkat pengabdian yang seharusnya dibayarkan di bulan Desember 2019 sebesar Rp378.260 namun ditangguhkan sampai tahun 2020
3. Terdapat belanja langganan dan jasa berupa tagihan listrik, telepon, dan internet yang seharusnya dibayarkan di bulan Desember 2019 sebesar Rp51.790.132 namun di tangguhkan sampai tahun 2020

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Makassar adalah:

1. MANDIRI KC. MAKASSAR KARTINI A/C 152-009603674-0 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099422) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0.
2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA A/C 0050-01001094-30-4 a.n. BPg 136 PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG (099423) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0.
3. Bank Tabungan Negara Cabang Makassar A/C 00372-01-30-000042-4 a.n. RPL 136 PN Makassar Utk PDT yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.749.318.707.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perubahan POK berupa pergeseran antar belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.
2. Revisi DIPA yang disebabkan belanja pegawai yang minus.

F.2.5. Ralat SPM,SSBP,dan SSPB

Terdapat ralat SPM berupa :

1. Perubahan SPM No. 00122/099422 tanggal 04 September 2019 karena perubahan kode BA dan Unit Es.1 dari 999.99 menjadi 005.01
2. Perubahan SPM No. 00142/099422 tanggal 21 Oktober 2019 karena perubahan akun potongan dari 521119 menjadi 51119

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 55/PA/SK/XI/2019 tanggal 01 Nopember 2019 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna barang Pengadilan Negeri Makassar telah dilakukan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran semula Drs. Bahar Mattaliu, SH menjadi Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Erwin Syam , ST.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Makassar

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Tot. Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2019	2019	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2019
A.	Peralatan dan Mesin		8.867.025.371	6.900.654.179	633.827.730	7.534.481.909	1.332.543.462
1	Alat Bantu	7	1.598.486.077	947.552.044	216.978.011	1.164.530.055	433.956.022
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	941.965.092	929.568.582	12.396.510	941.965.092	0
3	Alat Kantor	5	931.359.804	633.884.204	114.818.800	748.703.004	182.656.800
4	Alat Rumah Tangga	5	2.620.008.193	2.294.900.601	101.854.023	2.396.754.624	223.253.569
5	Alat Studio	5	343.738.205	295.958.401	12.740.924	308.699.325	35.038.880
6	Alat Komunikasi	5	85.814.300	37.602.290	20.662.290	51.377.150	34.437.150
7	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	0	0	0	0	0
8	Komputer Unit	4	1.811.133.745	1.418.823.834	114.375.822	1.533.199.656	277.934.089
9	Peralatan Komputer	4	532.719.955	340.564.223	46.888.780	387.453.003	145.266.952
1	Peralatan Olah Raga	3	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	0
B.	Gedung dan Bangunan		58.404.578.800	3.599.917.198	2.304.023.853	5.903.941.051	52.500.637.749
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	55.050.094.800	3.251.574.632	2.085.427.996	5.337.002.628	49.713.092.172
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	3.354.484.000	348.342.566	218.595.857	566.938.423	2.787.545.577
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0	0	0	0	0
D.	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0	0	0

2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	0	0	0	0	0
3	Barang Bercorak Kesenian	4	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
4	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	0	0	0	0	0
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan		0	0	0	0	0
1	Alat Kantor	5	0	0	0	0	0
2	Alat Rumah Tangga	5	0	0	0	0	0
3	Alat Studio	5	0	0	0	0	0
4	Alat Komunikasi	5	0	0	0	0	0
5	Alat Kedokteran	5	0	0	0	0	0
6	Komputer Unit	4	0	0	0	0	0
7	Peralatan Komputer	4	0	0	0	0	0
8	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	0	0	0	0	0
9	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0	0	0
1	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	0	0	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		67.271.604.171	10.350.242.335	2.937.851,583	13.438.422.960	53.833.181.211
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		67.273.104.171	10.351.742.335	2.937.851,583	13.439.922.960	53.833.181.211

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Makassar
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1		U	-	-	-	-	-
Jumlah :				-	-	-	-



Catatan atas Laporan
Keuangan

005
01
1900
099422

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}